

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa ataupun kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten/kota. Ia diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten /kota. (Hanif Nurcholis :2002). Dalam mengatur sistem pemerintahan daerah, desa memiliki hak otonomi daerah sehingga mampu mengatur dan mengembangkan potensi dan sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Pemberian hak otonom ini perlu dilakukan beberapa pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Kedudukan desa sangatlah penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa sangatlah penting dalam mendukung proses pembangunan dan pemerintahan desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli daerah, APBD, dan APBN. Jadi setiap Pemerintah Kabupaten atau Kota harus mengalokasikan dana dari APBD nya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/ kota yang sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan kemudian diterima oleh Kabupaten atau

Kota dengan jumlah minimal 10%. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .

Selain disebutkan dalam Permendagri, peraturan terkait Alokasi dana desa juga telah di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 3 disebutkan bahwasanya salah satu tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta pembangunan infrastruktur pedesaan. Kemudian menurut Hanif Nurcholis (2002) adalah meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu pemberdayaan masyarakat ini bisa dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bisa dikembangkan dengan baik serta dikelola sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut. Seperti halnya di Kecamatan Seyegan yang memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya sehingga dapat memberikan manfaat sekaligus menambah penghasilan masyarakat.

Pada tahun 2016 Kecamatan Seyegan termasuk daerah yang memiliki potensi perikanan tertinggi se Kabupaten Sleman. Hal ini merupakan keuntungan yang besar bagi masyarakat Kecamatan Seyegan karena potensi sumber daya alam memiliki bobot yang sangat tinggi dalam menentukan potensi sumber daya wilayah suatu daerah dengan syarat harus mampu mengelola potensi tersebut agar terus meningkat. Selain karena

sumber daya alamnya Kecamatan Seyegan juga merupakan salah satu Kecamatan Tertinggi ketiga dalam pembangunan sarana pendidikan setelah Kecamatan Pakem dan Kecamatan Depok. Jumlah sarana pendidikan juga lumayan tinggi apalagi pembangunan gedung untuk sekolah menengah keatas.

Adapun jumlah budidaya perikanan di Kecamatan Seyegan pada tahun 2016 adalah 20.481 dengan rincian Desa Margomulyo sebesar 2.582 kg/m², Desa Margoluwih sebesar 1.817 kg/m², Desa Margokaton sebesar 11.053 kg/m², Desa Margodadi sebesar 2.577 kg/m², dan Desa Margoagung sebesar 2.452 kg/m². Selanjutnya Kecamatan yang memperoleh tertinggi kedua adalah Kecamatan Berbah dengan jumlah sebesar 18.393 dan yang terakhir adalah Kecamatan Depok dengan jumlah 14.973.

Data di atas menunjukkan bahwasanya jumlah budidaya perikanan di Kecamatan Seyegan tertinggi se Kabupaten Sleman dengan jumlah 20.481. Kemudian tertinggi selanjutnya diperoleh Kecamatan Berbah dan Depok. Budidaya perikanan di Kecamatan Seyegan ini merupakan salah satu budidaya ikan yang unik karena menggabungkan antara dua kegiatan yaitu budidaya ikan dan penanaman padi. Kegiatan ini menjadi salah satu inovasi yang banyak diikuti di beberapa wilayah. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dan juga pemerintah Seyegan.

Dengan adanya potensi alam tersebut tentu perlu adanya pembiayaan untuk mengembangkan potensi tersebut. Adanya Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi tersebut sehingga terus meningkat. Pada tahun ini anggaran Alokasi Dana Desa yang diterima Kecamatan Seyegan merupakan jumlah tertinggi ketiga setelah Kecamatan Nganglik dan Kecamatan Tempel. Dengan adanya alokasi dana desa yang tinggi ini diharapkan untuk mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam proses peningkatan terhadap potensi alam ataupun sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Seyegan sehingga bisa menambah kesejahteraan masyarakat. Jumlah dana desa dan alokasi dana desa yang diterima pada tahun 2016 menurut Web Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Dana Desa Kecamatan Seyegan Tahun 2015-2017

No	Nama Desa	2015	2016	2017
1	Margoluwih	333,143,000	768,560,000	987,306,000
2	Margodadi	330,632,000	755,696,000	970,388,000
3	Margomulyo	342,906,000	818,579,000	1,053,086,000
4	Margokaton	328,378,000	744,151,000	955,205,000
5	Margoagung	343,850,000	823,414,000	1,059,445,000

Sumber : Bappeda Sleman

Tabel 2 Jumlah Alokasi Dana Desa Kecamatan Seyegan Tahun 2015-2017

No	Nama Desa	2015	2016	2017
1	Margoluwih	1.193.463.379	1.250.276.000	1.297.776.000
2	Margodadi	1.119.284.844	1.162.978.000	1.196.610.000
3	Margomulyo	960.338.155	999.707.000	1.282.733.000
4	Margokaton	1.195.661.064	1.258.239.000	1.042.662.000
5	Margoagung	1.133.205.808	1.186.646.000	1.223.056.000

Sumber : Bappeda Sleman

Jadi total Anggaran Dana Desa pada tahun 2016 di Kecamatan Seyegan berjumlah 3.910.400.000. jumlah anggaran ini jumlahnya meningkat di tahun selanjutnya yakni tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya. Begiupun dengan jumlah alokasi dana desanya yang total keseluruhannya pada tahun 2016 adalah 5.857.846.000.

Adapun dalam proses terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan dan pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa dan tentunya mengacu pada Peraturan Bupati Sleman No 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa. Kemudian untuk Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dengan jumlah 30%, dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sejumlah 70 %. Dengan adanya anggaran untuk pemberdayaan Masyarakat diharapkan mampu untuk di realisasikan sebagaimana mestinya. Sehingga potensi yang ada tetap meningkat.

Dengan adanya potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Seyegan baik itu dari segi budidaya perikanan, potensi beberapa wisata yang ada di daerah tersebut ataupun potensi lainnya diharapkan mampu menjadi sumber dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, saya akan mengangkat judul “ Persepsi masyarakat terhadap optimalisasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seyegan Tahun 2016-2019 “

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Optimalisasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap optimalisasi alokasi dana desa di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa ? apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya atau masih belum?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana pembelajaran dan pemahaman bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti maupun bagi

masyarakat terhadap persepsi masyarakat dalam mengoptimalkan alokas dana desa

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman khususnya pada tahun 2016
- b. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian dengan judul Persepsi masyarakat terhadap Optimalisasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seyegan Pada Tahun 2016

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Desmon Mahamurah, Markus Kaunang, Sarah Sambiran dengan judul penelitian “ Optimalisasi Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (studi di desa Nahepese Kecamatan Mangatinu). Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasanya Alokasi Dana Desa di Desa Nehepese masih belum optimal. Hal ini karena kurangnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016. Padahal pada dasarnya

pembagian alokasi dana desa sebesar 70% untuk digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari dengan judul penelitian “Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwasanya Pemerintah di Desa Margolembo, Kecamatan Luwu Timur sudah mengalami perkembangan dalam hal administratif dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi, ada beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti masyarakat masih terlalu memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah, pengawasan dari tim pengawas yang belum maksimal dan kurangnya sumber daya manusia di kantor Desa Margolembo Kecamatan Luwu Timur.

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo dengan judul penelitian “ Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa “ dari hasil penelitian ini diketahui bahwasanya penggunaan Alokasi Dana Desa belum digunakan sebagaimana fungsinya. Karena ditemukan bahwa anggaran untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah dan BPD. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan oleh masyarakat.

Keempat adalah Penelitian yang dilakukan oleh Nova Sulastri (2016) dengan judul penelitian “ Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan

Watopute Kabupaten Muna. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dan menjelaskan faktor faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan fisik.

Kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Rosfa Nur Azizah (2017) Dengan judul penelitian “Strategi Optimalisasi pembangunan Infrastruktur desa melalui program pemberdayaan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.” dari hasil penelitian ini di jelaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan kurang optimalisasi. Hal ini dilihat dari keenam program yang di rencanakan namun yang terlaksana hanya satu program saja. Sedangkan program lainnya tidak terlaksana. Karena terkendala masalah anggaran yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh aparaturnya desa dengan harga LKPP.

Keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh siti Ainul Wida dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban masih belum berjalan dengan baik. Hal ini karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat dan juga karena kurangnya sumber daya manusia dalam pembuatan laporan administrasi sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Adapun

persamaannya yaitu dalam penelitian ini sama- sama membahas tentang proses pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian yang membedakan disini yaitu dalam penelitian ini saya lebih memfokuskan objek penelitiannya pada persepsi masyarakat karena masyarakatlah yang lebih merasakan bagaimana pelayanan ataupun pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di laksanakan oleh pemerintah desa.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi sosial merupakan suatu proses penafsiran, penilaian dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Kemudian Apa yang telah diperoleh, ditafsirkan, ataupun dinilai yakni berupa informasi yang telah didapat melalui lingkungan sekitar. Jadi objeknya disini adalah orang lain(Sarwono dan Meinarno, 2009: 24).

Branca, 1964; Woodworth dan Marquis, 1957 (dalam Walgito, 1991: 53) Persepsi merupakan suatu proses yang di dahului oleh penginderaan. Sedangkan Penginderaan merupakan stimulus yang diterima oleh tiap-tiap individu melalui alat indera. Kemudian stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat kendali dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Oleh sebab itu proses persepsi tidak dapat dipisahkan dari proses penginderaan. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya agar memudahkan dalam memberikan respon atau tanggapan berupa penafsiran atau penilaian. Misal disini adanya

persepsi dari tokoh masyarakat tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dalam memberikan penafsiran terhadap suatu kejadian yang sudah terlihat oleh panca indera dengan tindakan yang sesuai dengan nilai agama dan hukum moral yang ada.

Menurut Leavitt (dalam Sobur,2003:445), Persepsi (*Percepstion*) dalam arti sempit diartikan sebagai penglihatan yakni bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi ialah pandangan atau pengertian, yakni bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Desiderato (dalam Rakhmat, 1994: 51) menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*).

Menurut Walgito (1989: 54) beberapa hal yang perlu diperhatikan agar persepsi dapat disadari oleh individu yaitu:

- a. Adanya objek yang akan dipersepsikan. Objek ini akan menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera reseptor),dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima (sensoris yang bekerja sebagai reseptor)
- b. Alat indera atau reseptor Yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang di terima reseptor ke pusat

syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan Respon diperlukan syaraf motoris.

- c. Adanya perhatian. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi terhadap sesuatu diperlukan adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu kesiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

Kemudian dalam menentukan suatu persepsi tentu diperlukan subjek yang akan memberikan perhatian terhadap objek yang di persepsikan. Yang mana dalam penelitian ini subjeknya adalah masyarakat. Karena masyarakat merupakan sasaran dari adanya alokasi dana desa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Oleh sebab itu Walgito (1990: 54-55) menyebutkan beberapa indikator dari persepsi masyarakat yang meliputi :

- a. Penyerapan, individu ataupun masyarakat menerima objek melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap baik itu secara bersamaan ataupun tidak
- b. Pengertian dan pemahaman, rangsangan yang telah masuk ke otak berupa gambaran ataupun kesan yang kemudian diinterpretasikan
- c. Penilaian, tahap evaluasi dipengaruhi oleh adanya nilai, norma dan aturan yang di anut tiap-tiap individu, maka dari itu penilaian akan bersifat objektif atau bersifat individual.

Dari beberapa teori diatas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya persepsi itu merupakan sebuah penilaian ataupun cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang sudah ia ketahui secara langsung ataupun melalui perantara media. Kemudian indikator dari persepsi masyarakat itu sendiri meliputi menyerap, mengerti dan memahami serta menilai atau evaluasi.

2. Optimalisasi

a. Definisi Optimalisasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Optimalisasi berasal dari kata dasar Optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Sehingga Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah design, sistem dan keputusan) menjadi lebih / sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. (KBBI, 1994 : 800). Menurut Winardi dalam (Hamdalah, 2014:41) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan dan pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada sebuah konteks.

Sons (dalam Hamdalah, 2014:41) juga menyebutkan Optimalisasi adalah tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dengan segala keadaan yang diberikan, serta sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang mendapatkan nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi. Dari beberapa teori diatas, Optimalisasi dapat diartikan

sebagai sebuah cara, upaya, proses dan perbuatan untuk dapat menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam tujuan untuk mencapai suatu kondisi yang terbaik, paling diinginkan, paling menguntungkan dalam sebuah batas-batas dan kriteria tertentu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dari departemen pendidikan nasional, kata optimalisasi dapat diartikan sebagai berikut:

1. Menjadikan paling baik
2. Paling tinggi, dsb.

Kemudian Optimalisasi menurut WJS Poerwadarminta (2003) berasal dari kata optimum yang berarti yang terbaik, paling menguntungkan. Dalam hal ini, optimalisasi membuat sesuatu menjadi lebih baik lagi. Sedangkan optimum adalah tingkatan yang sangat menguntungkan dalam batas-batas tertentu dan pengoptimalan merupakan penyempurnaan suatu sistem supaya berprestasi sebaik-baiknya atas dasar kriteria-kriteria tertentu. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Adapun indikator dari Optimalisasi menurut jurnal Desmon Mahamaroh (2017) disini di sebutkan beberapa poin penting yaitu :

1. Tujuan yang direncanakan dapat dicapai

2. Tidak mengurangi mutu dan kualitas dari tujuan tersebut
3. Mewujudkan keuntungan yang diinginkan
4. Pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien
5. Kebutuhan yang terpenuhi dari adanya kegiatan yang dilaksanakan.

Kemudian ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

1. Tujuan : Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.
2. Alternatif Keputusan : Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumberdaya yang Dibatasi : Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Berkaitan dengan penelitian ini maka indikator yang digunakan adalah sebagaimana di sebutkan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yang mana dalam pasal 2 disebutkan bahwasanya pengelolaan keuangan desa harus di lakukan berdasarkan asas-asas berikut ini:

1. Transparansi yaitu kejujuran dan keterbukaan informasi seluas-luasnya bagi *Stakeholders* untuk mengetahui setiap detail penggunaan anggaran dari alokasi dana desa
2. Akuntabel yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa
3. Partisipatif yaitu keikutsertaan serta keterlibatan masyarakat desa dalam memutuskan dan menetapkan kebijakan desa
4. Dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yaitu informasi yang harus disampaikan terkait kecukupan dana yang diperoleh pemerintah desa untuk membiayai seluruh

pengeluaran desa serta ketepatan waktu yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan

Selain asas-asas yang disebutkan dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 ada beberapa hal juga yang dapat dijadikan indikator dalam optimalisasi alokasi dana desa yaitu :

1. Integrasi
2. Adaptasi
3. Pencapaian Tujuan
4. Ketepatan penggunaan anggaran
5. Ketepatan penggunaan sumber daya manusia
6. Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia

Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu.

3. Alokasi Dana Desa

a. Definisi Alokasi dana desa

Menurut Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa, Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk membiayai semua program pemerintahan desa. Jumlahnya paling sedikit

10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Nur Cholis (2002: 89), rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah :

1. Asas merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi dana desa Minimal (ADDM)
2. Asas Adil, yaitu besarnya bagian Alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

Adapun tujuan dari adanya alokasi dana desa menurut Hanif Nurcholis (2002) adalah sebagai berikut :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

b. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.

Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dasar Hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut diantaranya (Haryati, 2015) :

1. Peraturan Pemerintah dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
2. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa
3. Peraturan Bupati Sleman nomor 6 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa

Besaran ADD dihitung berdasarkan variable-variabel Independent utama meliputi

1. Kemiskinan
2. Pendidikan dasar
3. Kesehatan
4. Keterjangkauan desa.

Adapun variable independen tambahan terdiri jumlah penduduk.

Untuk mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang baik pemerintah desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam permendagri nomer 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa meliputi:

1. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.
2. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
3. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
4. Pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan erundang undangan yang berlaku.

Kesimpulan dari beberapa teori di atas terkait dengan Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan untuk mengembangkan potensi daerah yang diberikan oleh pemerintahan kabupaten/kota minimal 10% dari APBD dan sudah dikurangi dana alokasi khusus.

G. Definisi Konseptual

- a. Persepsi merupakan penilaian ataupun pandangan seseorang terhadap suatu keadaan sosial di sekitarnya berdasarkan pengalaman yang sudah ia jalani.
- b. Optimalisasi merupakan sebuah tindakan, upaya ataupun cara dalam mencapai tujuan untuk memperoleh hasil yang baik dan maksimal sesuai dengan apa yang di rencanakan
- c. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau kota dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi yang ada di desa baik dari segi sumber daya manusianya ataupun dari segi pembangunannya.

H. Definisi Operasional

- a) Indikator persepsi masyarakat
 - a. Menyerap / menerima
 1. Masyarakat kecamatan Seyegan menerima Alokasi dana desa secara rutin tiap tahunnya

2. Masyarakat kecamatan Seyegan menerima informasi tentang alokasi dana desa dengan baik

b. Memahami

1. Masyarakat Kecamatan Seyegan memahami fungsi dan tujuan alokasi dana desa dengan baik
2. Masyarakat kecamatan seyegan memahami pengelolaan alokasi dana desa secara sistematis

c. Menilai/ evaluasi

1. Masyarakat Kecamatan Seyegan melakukan evaluasi terhadap kemampuan pemerintah dalam hal pengelolaan alokasi dana desa
2. Masyarakat Kecamatan Seyegan melakukan evaluasi terhadap program dan fungsi alokasi dana desa
3. Masyarakat Kecamatan Seyegan melakukan evaluasi kinerja pemerintah dalam mengatur alokasi dana desa?

b) Indikator optimalisasi

a. Transparansi

1. Pemerintah kecamatan Seyegan memberikan informasi secara terbuka terkait alokasi dana desa

2. Masyarakat kecamatan Seyegan mengetahui dengan mudah kegunaan anggaran alokasi dana desa dan program yang direncanakan
3. Pemerintah desa di Kecamatan Seyegan menginformasikan terkait pemasukan dan pengeluaran Alokasi dana desa

b. Akuntabel

1. Pemerintah desa di Kecamatan Seyegan melakukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan alokasi dana desa

c. Partisipatif

1. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan pandangan ataupun usulan terhadap alokasi dana desa
2. Masyarakat di beri kesempatan untuk mengelola keuangan desa termasuk alokasi dana desa
3. Masyarakat ikut terlibat dalam mengembangkan tujuan dan program alokasi dana desa

d. Tertib dan disiplin anggaran

1. Pemerintah menjalankan program sesuai dengan waktu yang ditentukan
2. Penggunaan anggaran alokasi dana desa sudah sesuai dengan fungsinya

3. pemerintah desa melaksanakan program kerja secara tepat waktu

c) Indikator Alokasi Dana Desa

- a. Menanggulangi Dan Mengurangi Kemiskinan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dan apabila ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemology dari kegiatan penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berspesifik pada sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan design penelitian. Menurut sugiyono (2012), metode kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik deskriptif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap optimalisasi alokasi dana desa di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Tahun 2016. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis deskriptif disini untuk menggambarkan secara rinci terkait fokus penelitian yaitu persepsi masyarakat terhadap optimalisasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Tahun 2016.

b. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi, peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman karena ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap optimalisasi Alokasi Dana Desa di daerah tersebut.

d. Jenis data

1. Data Primer

Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer sering juga disebut sebagai *first hand information* yaitu sumber data asli dari responden. Data primer bisa juga berupa kumpulan data aktual dari suatu peristiwa yang terjadi. Sumber data primer biasanya didapatkan dari individu, kelompok fokus dan satu kelompok responden secara khusus.

Data primer dalam penelitian ini di dapat dari responden dengan cara menyebar kuisioner kepada masyarakat di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman.

2. Data Sekunder

Menurut Silalahi (2012 : 291) data sekunder atau yang sering disebut sebagai *second hand information* adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau berasal dari data-data yang sudah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Sumber data sekunder antara lain

berupa artikel ,jurnal, arsip organisasi, artikel dalam surat kabar, laporan-laporan, temuan survei terdahulu, publikasi dari pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

e. Teknik pengumpulan populasi dan sampel

1. Populasi

Menurut Bungin dalam skripsi Agisni (2013: 38) populasi berasal dari bahasa inggris *Population*, yang berarti jumlah penduduk. Menurut Usman dan Setyadi dalam skripsi Agisni (2013:38) populasi adalah semua nilai baik dari perhitungan maupun pengukuran dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman yang berjumlah 5 desa dengan jumlah populasi sebesar 49.845

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2015:118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi, bila populasi pada penelitian cukup besar maka peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi karena keterbatasan waktu dan biaya. Maka peneliti dapat menggunakan sampel. Dalam penentuan sampel ada beberapa metode yang dapat digunakan, namun peneliti menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2015:124) *Sampling Purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain

purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara sengaja yang telah sesuai, memiliki tujuan tersendiri dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yaitu: sifat, kriteria, dan ciri-ciri tertentu (Sulastri:2016). Dalam penelitian ini penulis memilih sampel secara sengaja pada masyarakat di kecamatan Seyegan. Sedangkan dalam memilih sampel masyarakatnya penulis menggunakan *Random Sampling* atau secara acak. Menurut Sugiyono (2015:120) *Random Sampling* merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pemilihan sampel tersebut memiliki alasan tersendiri yaitu dengan tujuan agar lebih tepat dengan sasaran. Dengan demikian penulis menentukan secara sengaja dan acak dalam pemilihan sampel di kecamatan tersebut.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus Slovin dengan perhitungan jumlah sampel, populasi dan batas toleransi kesalahan 10% (*error tolerance*). Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 n &= N / (1+N \times e^2) \\
 &= 49.845 / 1 + 49.845 (10^2) \\
 &= 49.845 / 49.845 (0,01) + 1 \\
 &= 49.845 / 498,45 + 1 \\
 &= 49.845 / 499,45 \\
 &= 99,79
 \end{aligned}$$

$$= 100$$

Keterangan

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

E : Batas toleransi Kesalahan (*error tolerance*) (10%)

Hasil dari perhitungan di atas dengan menggunakan rumus Slovin menghasilkan 100 kuisisioner.

f. Teknik Pengumpulan data

Menurut Silalahi (2012 : 291) metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam pengumpulan data dari fenomena empiris. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner

1. Kuisisioner

Menurut Sugiyono (2013) kuisisioner adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan maupun pernyataan secara tertulis kepada responden. Dalam pelaksanaannya, terjun langsung ke lapangan perlu dilakukan untuk mendapat data yang diinginkan karena melalui metode ini memerlukan kontak langsung antara responden dan peneliti. Kuisisioner yang disebarkan berfokus pada masyarakat di beberapa desa di kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman. Adapun skala yang digunakan dalam kuisisioner ini adalah skala likert. Menurut sugiyono (2012:93) skala likert digunakan

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang atau tentang fenomena sosial. Dalam menjawab skala likert ini, responden hanya memberi tanda, misalnya checklist atau tanda silang pada jawaban yang dipilih sesuai pernyataan. Kuisioner yang telah diisi responden perlu dilakukan penyekoran. Berikut ini bobot penilaian pada skala likert.

Tabel 3 bobot penilaian skala likert

Pernyataan	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber : Sugiyono (2012)

2. Dokumentasi

Menurut Ridwan dalam skripsinya Dimas Septian Riskiyanto (2017: 47), Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dalam penelitian. Metode dokumentasi ini untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dengan teknik sebelumnya, yaitu dengan mencatat atau menyalin bahan-bahan berupa gambaran umum Kecamatan Seyegan yang meliputi profil, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, sarana, dan prasarana serta kegiatan-kegiatan pendukung dalam hal yang berkaitan dengan optimalisasi alokasi dana desa.

g. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena dengan cara analisis ilmiah manfaat dari sebuah data pasti akan tampak, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan tujuan akhir dari sebuah penelitian. Dalam penelitian peneliti menggunakan kuisioner untuk memperoleh data dari responden. Kuisioner yang digunakan berbentuk skala lima tingkat (Likert).

Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$P = f/n * 100\%$$

Keterangan :

P : prosentase

F : frekuensi atau banyaknya jawaban

n : jumlah responden

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif. Yang mana teknik statistik deskriptif menurut Sugiyono (2015) merupakan teknik yang digunakan pada peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau juga dapat dinyatakan dengan angka (skala, indeks, rumus dan sebagainya). Kemudian untuk menyimpulkan data yang telah diperoleh dari kuisioner tersebut menggunakan skal indeks dengan rumus berikut :

$$I = \frac{1.F1+2.F2+3.F3+4.F4+5.F5}{n}$$

N

Keterangan :

I : indeks

F : Frekuensi sampel/ sub sampel

N : jumlah sampel

1 : kategori sangat tidak

2 : kategori tidak baik

3 : kategori cukup baik

4 : kategori baik

5 : kategori sangat baik

F1 : Sangat tidak baik

F2 : Tidak baik

F3 : Cukup baik

F4 : Baik

F5 : Sangat baik

Untuk menghitung nilai interval dari nilai-nilai indeks adalah sebagai berikut :

Interval = Nilai tertinggi – Nilai terendah

Banyaknya kriteria

$$= \frac{5-1}{5}$$

$$= 0,08$$

Keterangan :

4,21 – 5,00 = Sangat baik

3,41 – 4,20 = Baik

2,61 – 3,40 = Cukup Baik

1,81 – 2,60 = Tidak Baik

1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Baik

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner yang telah diisi dengan persepsi masyarakat, maka hasil data dapat dihitung indeksinya dengan beberapa cara dibawah ini (Riskianto, 2017: 48)

1. Hasil dari masing-masing jawaban yang diberi bobot nilai semakin besar semakin baik. Misalnya : Sangat baik = 5, Baik = 4, Cukup Baik = 3, Tidak Baik = 2, dan Sangat Tidak Baik = 1.
2. Menghitung bobot masing- masing alternatif jawaban dengan mengalikan bobot dan frekuensinya
3. Menghitung indeks dengan membagi jumlah keseluruhan bobot alternatif dengan banyaknya jawaban yang diberikan.

h. Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukam fungsi ukurannya (Azwar 1986). Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel

yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan Schindler, dalam Zulganef, 2006).

Sedangkan menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghazali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Untuk melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson). Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap à Valid. Jika r hitung $\geq r$ tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

i. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari kata *reliability*. Pengertian dari *reliability* (reliabilitas) adalah keajegan pengukuran (Walizer, 1987). Sugiharto dan Situnjak (2006) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya dilapangan. Ghozali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel

Menurut Masri Singarimbun, realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali – untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relative konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliable*. Dengan kata lain, realibitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama.

Menurut Sumadi Suryabrata (2004: 28) reliabilitas menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil

pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan.

Reliabilitas, atau keandalan, adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama (tes dengan tes ulang) akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip (reliabilitas antar penilai). Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda.